

RESEARCH ARTICLE

Sejarah dan Perkembangan Konflik Gerakan Separatisme Aceh

Najwa Aulia Salwa✉

Universitas Sebelas Maret

✉ salwaaulia855@gmail.com

ABSTRACT

The separatist movement is one of the problems that has existed and is still being faced. One of the separatist movements occurred in Aceh. This research aims to find out the history of Aceh separatism and find out what policies the government has implemented, as well as analyzing the effectiveness of these policies. This research uses a qualitative literature review method, a descriptive-analytical approach by collecting data from various sources. From this research it can be concluded that Aceh separatism started from resistance to Dutch colonialism until the emergence of the Free Aceh Movement (GAM) in 1976. This conflict was a prolonged conflict between the Indonesian government and the people of Aceh, initiating and mediating by international parties. On July 17 2005 in Vantaa, Finland, the two parties succeeded in reaching a peace agreement after negotiating for 25 days. This agreement ended the Aceh separatist conflict. The government also implemented several policies to overcome Aceh separatism, such as implementing special autonomy, signing the Helsinki memorandum of understanding, and creating the Aceh Reintegration Agency (BPR). One of the policies implemented was the signing of the Helsinki MoU memorandum of understanding in 2005. This policy was considered quite effective in overcoming the problem of Aceh separatism even though there were still many challenges in its implementation.

Keywords: Separatism, Autonomy, Treaty.

ABSTRAK

Gerakan Separatisme adalah salah satu masalah yang telah ada dan masih dihadapi. Salah satu gerakan separatisme terjadi di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah separatisme aceh dan mengetahui kebijakan apa yang telah diterapkan pemerintah, serta menganalisis keefektifan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif literatur review pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa separatisme Aceh dimulai dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda hingga munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Konflik ini merupakan konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh, memulai dan memediasi oleh pihak internasional. Pada tahun tanggal 17 Juli 2005 di Vantaa, Finlandia, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai setelah berunding selama 25 hari. Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik separatisme Aceh. Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan untuk

mengatasi Separatisme Aceh, seperti pemberlakuan otonomi khusus, penandatanganan nota kesepakatan Helsinki, dan pembuatan Badan Reintegrasi Aceh (BPR). Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penandatanganan nota kesepakatan MoU Helsinki pada tahun 2005. Kebijakan ini dinilai cukup efektif untuk mengatasi permasalahan separatisme aceh meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya.

Kata Kunci: Separatisme, Otonomi, Perjanjian.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, budaya, dan agama, Indonesia selalu menghadapi kesulitan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Gerakan separatisme adalah salah satu masalah yang telah ada dan masih dihadapi. Kegelisahan masyarakat terhadap sikap pemerintah pada suatu wilayah maupun kelompok yang dianggap tidak adil adalah alasan utama gerakan ini. Konflik separatisme di Aceh merupakan salah satu konflik berkepanjangan di Indonesia. Akar konflik ini dapat dilacak hingga masa penjajahan Belanda, dimana tuntutan kemerdekaan Aceh diabaikan. Pasca kemerdekaan Indonesia, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan keinginan untuk mempertahankan identitas budaya Aceh semakin memicu gerakan separatis. Situasi memburuk pada 1970-an dengan munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan secara terbuka melalui perjuangan bersenjata. Konflik berkecamuk selama puluhan tahun dengan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang besar. Upaya penyelesaian dilakukan melalui operasi militer dan dialog damai. Namun, konfrontasi terus berlanjut hingga ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada 2005 di Helsinki. Perjanjian ini menghentikan kekerasan dan memberikan otonomi khusus bagi Aceh dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Meski masih ada tantangan, perdamaian di Aceh telah membawa stabilitas dan kemajuan pembangunan di wilayah ini. Konflik Aceh menjadi pembelajaran penting tentang resolusi konflik dan upaya membangun kesatuan dalam keberagaman di Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif literatur review pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sejarah separatisme aceh dan peran pemerintah dalam mengatasinya.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Sejarah Separatisme Aceh

Separatisme Aceh telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada abad ke-16 dan ke-17 Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan ini menanamkan semangat nasionalisme dan kebangsaan Aceh yang kuat. Rakyat Aceh melawan Belanda dalam Perang Aceh yang berlangsung hingga 1904 ketika mereka menentang penjajahan mereka di Aceh pada tahun 1873. Belanda menerapkan kebijakan represif dan eksploitatif di Aceh setelah berhasil menaklukkannya. Dengan demikian, para pejuang Aceh yang tidak ingin tunduk kepada Belanda memulai perlawanan bersenjata. Sampai menjelang kemerdekaan Indonesia, perjuangan ini terus berlanjut. Pemuda Aceh membentuk organisasi bawah tanah pada akhir penjajahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Aceh yang terpisah dari Indonesia. Pengalaman lama berperang melawan penjajah dan keinginan untuk tidak lagi tunduk kepada kekuatan asing menimbulkan keinginan dan hasrat untuk menjadi negara sendiri.

Rasa separatisme di Aceh muncul kembali setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Daud Beureueh memimpin Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Aceh pada tahun 1953. Dalam gerakan ini, mereka menuntut pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh serta status otonomi khusus untuk Aceh. Namun, pemerintah pusat yang dipimpin Soekarno saat itu menolak tuntutan tersebut dan mengerahkan militer untuk menghancurkan pemberontakan NII. Hasan di Tiro, pemimpin GAM melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia bersama dengan para anggotanya di perbukitan Halimunan di wilayah Kabupaten Pidie pada tanggal 4 Desember 1976. Sejak saat itu, konflik terus berlangsung antara aksi separatistis GAM dengan pemerintah Indonesia. GAM melakukan gerilya untuk pertama kalinya pada tahun 1977 dan mengibarkan panji perang, tetapi gerakan itu gagal karena pemerintahan pusat berhasil menetralsirkannya. Sampai saat ini, GAM masih gagal melakukan perang gerilya. Namun, GAM memperbaiki gerakan separatistisnya pada tahun 1989 dengan mendapatkan bantuan kurang lebih 1.000 tentara dari Libya dan Iran. Para anggota mendapat komando militer, akibatnya mereka lebih terorganisir dan terlatih. Karena ancaman ini, pemerintah akhirnya menjadikan Aceh sebagai DOM. Operasi ini mengakibatkan sekitar 7.000 pelanggaran hak asasi manusia. Perkampungan yang diprediksi menjadi tempat tentara GAM dibakar, serta para anggota keluarga tentara GAM ditangkap dan dihukum.

Pada tahun 1998, Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J Habibie. Beliau menyerukan penarikan segenap delegasi dari Aceh selama kepemimpinannya supaya GAM dapat membangun kembali organisasinya. Namun, kekerasan justru meningkat pada tahun 1999. GAM menyelundupkan banyak senjata dari Thailand dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan penduduk Jawa. Warga sipil menjadi korban kekerasan GAM. Untuk memberantas masalah ini, pemerintah melancarkan penyerbuan besar-besaran di Aceh pada tahun 2003, dengan keberhasilan yang semakin meningkat. Pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda gempa bumi dan tsunami. Karena banyaknya korban yang disebabkan oleh peristiwa ini, kedua belah pihak dipaksa untuk berbicara di meja perundingan untuk memulai dan memediasi oleh pihak internasional. Di Vantaa, Finlandia, pada tanggal 17 Juli 2005, Pemerintah Indonesia dan para anggota GAM sukses memperoleh kesepakatan untuk

berdamai setelah berunding selama 25 hari. Pada 15 Agustus 2005, kesepakatan damai ditandatangani. Pada tahun 2005 ini, kesepakatan Helsinki dicapai, yang mengakhiri konflik dan memberi Aceh otonomi khusus. Aceh sekarang cenderung stabil dan tenteram (Ulya, 2016).



Gambar 1. Gerakan Aceh Merdeka

Sumber: <https://images.app.goo.gl/27tNSsRqDW3iHvMb9>

3.2 Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Separatisme Aceh

- Pemberlakuan Otonomi Khusus Aceh
Diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang ini memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Selain itu terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA). Pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh adalah upaya untuk melaksanakan tugas hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
- Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki pada Tahun 2005
Kesepakatan Helsinki merupakan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak menyatakan komitmen mereka untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh secara tenteram, komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas bagi seluruh pihak. Kesepakatan Helsinki mencakup isi persetujuan yang dicapai serta prinsip-prinsip yang akan menuntun proses perubahan.
- Pembentukan Badan Reintegrasi Aceh
Pada tanggal 15 Agustus 2005 Nota Kesepahaman Helsinki telah ditandatangani, Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) didirikan, spesifiknya pasal 3.2, yang berbicara tentang reintegrasi mantan anggota GAM. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk reintegrasi mantan anggota GAM melalui berbagai pendekatan, tetapi timbul banyak tantangan selama proses reintegrasi yang diawasi oleh BRDA.

3.3 Keefektifan Kebijakan dalam Mengatasi Separatisme Aceh

- Pemberlakuan Otonomi Khusus Aceh

Selama ini, pemerintahan di Provinsi Aceh telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PA. Namun, terdapat beberapa hambatan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat dan Aceh untuk menerapkan pembagian otoritas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu penetapan otonomi yang dikhususkan bagi Provinsi Aceh, masih belum sepenuhnya diterapkan. Hukum, pemerintahan, politik, dan sosial masih menghadapi masalah.

- Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki pada Tahun 2005

Secara keseluruhan, dalam hal ini kebijakan penandatanganan MoU Helsinki telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam memerangi separatisme di Aceh. Hasil upaya CMI untuk membangun perdamaian di Aceh setelah MoU Helsinki menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya tersebut berhasil dan efektif. Beberapa keberhasilan yang dicapai mencakup:

- Konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah dapat diselesaikan.
- Ribuan anggota GAM menyerahkan senjata mereka dan bergabung dengan masyarakat.
- Pemilu di Aceh dapat diselenggarakan dengan aman dan damai pada tahun 2006 dan 2009.
- Partai lokal Aceh, seperti Partai Aceh, dapat dibentuk dan berkompetisi dalam pemilu.
- Pembangunan infrastruktur dan ekonomi Aceh dapat dilanjutkan secara lebih besar setelah konflik berakhir.

Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti reintegrasi mantan kombatan GAM, penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebelumnya, dan upaya untuk mempertahankan komitmen jangka panjang semua pihak.

- Pembentukan Badan Reintegrasi Aceh

Banyak hal yang telah dilakukan oleh BRA sejak dibentuk, tetapi organisasi ini dianggap belum menyelesaikan tugasnya terhadap beberapa kelompok yang telah memperoleh proses reintegrasi, yaitu pejuang GAM, korban konflik, serta tawanan politik. Pembentukan Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) adalah upaya untuk memastikan proses reintegrasi terus berlanjut dan membentuk badan baru. Namun, di bawah kepemimpinan Hanif Asmara, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) masih menghadapi banyak masalah reintegrasi fisik, mental, dan ekonomi. Masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Aceh Tengah telah beberapa kali mengunjungi kantor BRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Rakyat merasa bahwa hak mereka untuk diberi bantuan berupa rumah yang dijanjikan oleh BRA pada korban konflik belum terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa reintegrasi di Aceh masih belum terselesaikan.

KESIMPULAN

Sejarah separatisme Aceh memiliki akar yang panjang, dimulai dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda hingga munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Konflik berkepanjangan antara GAM dan pemerintah Indonesia telah menyebabkan kerugian besar baik dari segi material maupun korban jiwa. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk memerangi separatisme di Aceh, seperti pemberlakuan otonomi khusus Aceh, penandatanganan nota kesepakatan MoU Helsinki, dan Pembentukan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Salah satu kebijakan yang dianggap efektif adalah penandatanganan nota kesepakatan MoU Helsinki, kesepakatan damai ini terbukti relatif efektif dalam meredam konflik separatis. Meskipun tantangan implementasi otonomi khusus masih ada, kebijakan pemerintah dalam mengelola konflik Aceh pasca-2005 dapat dianggap berhasil karena mampu menghentikan kekerasan dan membawa stabilitas ke wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agassy, V. (2022, Maret 25). *Geotimes*. Retrieved from <https://geotimes.id/opini/sejarah-dari-gerakan-aceh-merdeka-gam/>
- Fakhrurrazi. (2011). Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh Dalam Proses Gencatan Senjata, Demobilisasi, Dan Reintegrasi Di Aceh. *Jurnal Komunitas*, 3(1), 12-18.
- Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 95-97.
- Perdana, I., & Ibrahim, H. (2017). Evaluasi Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) Dalam Penyelesaian Reintegrasi Aceh 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 1(1), 1-16.
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Politika*, 11(1), 65-83.
- Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal RechtsVinding*, 5(3), 323-337.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. (2024, Maret 1). Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepakatan_Helsinki